

“

# POLICY BRIEF

**Membangun Komplementaritas Antarkota di Sekitar Kawasan Nusantara:**  
*Jalan Tengah antara Gagasan Trikota dan Pancakota*



Following Frontiers of the Forest City

Work Package 4

---

A part of the Collaboration Research on **Following Frontiers of the “Forest City”** :  
**Towards Sustainable and Inclusive Urbanization in Kalimantan and Beyond**



**Utrecht  
University**



**UNIVERSITAS  
GADJAH MADA**



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

**IHE  
DELFT**

Institute for  
Water Education  
in partnership with UNESCO



**itk**  
Institut  
Teknologi  
Kalimantan



**Royal  
HaskoningDHV**  
Enhancing Society Together



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



**Supported by:**



---

## Judul Policy Brief

Membangun Komplementaritas Antarkota di Sekitar Kawasan Nusantara: Jalan Tengah antara Gagasan Trikota dan Pancakota

## Diolah dari Penelitian

“Urbanisasi Pada Wilayah Frontier Indonesia: Kasus Kawasan Ibukota Negara Baru dan Sekitarnya (Menuju Learning Lab untuk Sustainable Urbanization)”

## Tim Penulis

R. Rijanta, Azis Musthofa, Maulidia Savira Chairani, Zahra Nur Afiifah, Erlis Saputra, Alia Fajawati, Hafidz Wibisono, Mohammad Isnaini Sadali, Ari Susanti, Rosalina Kumalawati, Puput Wahyu Budiman, Rahmat Aris Pratomo, Jany Tri Raharjo

## Tim Peneliti

R. Rijanta, Erlis Saputra, Ari Susanti, Alia Fajawati, Maulidia Savira Chairani, Azis Musthofa, Hilary Reinhart, Zahra Nur Afiifah, Sephia Virginovaristha, Muhamad Rifki Rafida, Adji Saiddinullah, Muhammad Yuda Aditya, Rosalina Kumalawati, Puput Wahyu Budiman, Rahmat Aris Pratomo, Jany Tri Raharjo, Hafidz Wibisono, Agung Jauhari, Rizki Adriadi Ghiffari, Putri Khoirunisa, Mohammad Isnaini Sadali

## Tata Letak dan Ilustrasi

Zahra Nur Afiifah

## Saran Pengutipan

Rijanta R., dkk. (2025). Membangun Komplementaritas Antarkota di Sekitar Kawasan Nusantara: Jalan Tengah antara Gagasan Trikota dan Pancakota. *Forest City Policy Brief*. Forest City Consortium: Work Package (WP) 4

Work Package 4

Konsorsium Riset Following Frontiers of the Forest City

The Netherlands dan Indonesia

Departemen Geografi Pembangunan

Fakultas Geografi (FGE) Universitas Gadjah Mada

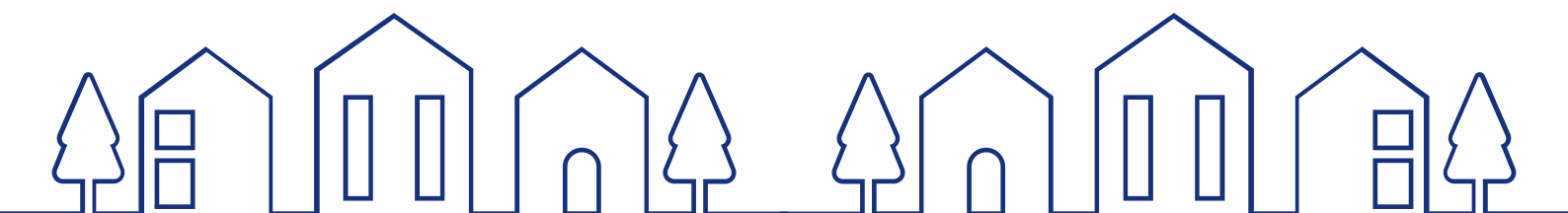
Sekip Utara, Bulaksumur

Yogyakarta 55281

<https://pw.geo.ugm.ac.id/en/home/>

<https://geo.ugm.ac.id/>

<https://forestcity.sites.uu.nl/>



---

# TEMUAN KUNCI



**P**emindahan Ibu Kota Negara diharapkan dapat menjadi penyeimbang disparitas pembangunan antara wilayah Indonesia bagian Timur dan Barat (Rijanta, 2022). Berbagai konsep pembangunan dikembangkan guna mencapai tujuan pemerataan tersebut, seperti melalui pengembangan superhub ekonomi, tri-kota. Selain itu, terdapat pula konsep *forest city*, *sponge city*, *smart city*, dan *lovable city* yang memuat cita-cita menjadi kota paling berkelanjutan di dunia sekaligus menjadi tujuan besar dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (Rijanta dkk, 2024).

Wilayah perkotaan pada dasarnya berkembang dengan ditopang oleh wilayah sekitarnya, tidak terlepas dengan dari peran kota dengan hirarki di bawahnya dan wilayah perdesaan (*hinterland*). Keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkages*), dan kawasan penyangga (*buffer zone*) tidak dapat dilepaskan dari perkembangan wilayah perkotaan, baik dari sisi penyediaan komoditas pangan, tenaga kerja, serta barang dan jasa lainnya (BRIDA Kalimantan Timur, 2024). Konsep daerah mitra yang digagas oleh pemerintah sesungguhnya telah menjawab kebutuhan ini. Namun, konsep ini belum diimplementasikan secara jelas bagaimana sistem ini akan bekerja layaknya interaksi wilayah yang terjadi secara natural.

Pangan, bahan bangunan, energi, serta tenaga kerja merupakan elemen vital yang hingga saat ini masih bergantung dari wilayah lain. Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan wilayah-wilayah sekitar (*trans-local*) melalui transfer berbagai material yang diperlukan dalam pembangunan IKN. Selain itu, integrasi yang lebih terstruktur antara kawasan inti IKN, kota-kota penyangga, dan wilayah perdesaan sebagai *hinterland* menjadi penting dalam menjalin kerja sama antar wilayah (Rijanta, 2023).

Berbagai dokumen rencana pembangunan IKN telah ditetapkan guna mencapai tujuan pembangunan, dan hingga saat ini memang masih didominasi oleh aspek ekonomi. Pengembangan kawasan industri di sekitar IKN juga harapannya dapat menopang kebutuhan ibu kota negara. Tapi masih sama, konsep yang dikembangkan masih condong pada aspek ekonomi. Sejatinya, Nusantara dibangun dengan berbagai konsep, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, lingkungan alam, dan teknologi.



## RINGKASAN EKSEKUTIF

**P**emindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi instrumen penyeimbang pembangunan antara Indonesia bagian Barat dan Timur. Berbagai konsep pembangunan seperti superhub ekonomi, tri-kota, *forest city*, *sponge city*, *smart city*, dan *lovable city* telah dirancang untuk mewujudkan IKN sebagai kota paling berkelanjutan di dunia. Namun, terdapat sejumlah tantangan mendasar yang harus diantisipasi.

**Pertama, ketergantungan sumber daya.** Hingga kini, IKN masih sangat bergantung pada pasokan pangan, material konstruksi, dan tenaga kerja dari luar wilayah Kalimantan Timur. Kondisi ini menimbulkan risiko kerentanan pangan, keterlambatan pembangunan, biaya logistik tinggi, serta minimnya manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.

**Kedua, ketimpangan peran kota.** Konsep kerja sama antar wilayah saat ini masih menitikberatkan pada kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda. Hal ini berpotensi memperkuat dominasi kota besar dan menyingkirkan peran kota sekunder serta *hinterland*-nya, padahal wilayah tersebut sangat penting sebagai basis penopang sumber daya yang dibutuhkan untuk berfungsinya kota secara wajar.

**Ketiga, perbedaan konsep pembangunan antar level pemerintahan.** Pemerintah pusat melalui OIKN dan Bappenas bersama JICA mendorong konsep Tri-Kota, sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menawarkan konsep Panca-Kota untuk memperluas cakupan wilayah. Belum sinkronnya arah kebijakan ini berpotensi melemahkan implementasi pembangunan yang inklusif.

**Keempat, orientasi pembangunan yang masih dominan pada aspek ekonomi.** Perencanaan IKN saat ini cenderung *urban-centric* dan berfokus pada sektor ekonomi, sementara aspek lingkungan, ekologi, dan integrasi desa-kota belum menjadi prioritas utama. Jika tidak diantisipasi, tantangan urbanisasi dan kerusakan lingkungan yang dialami kawasan metropolitan lain di Indonesia berpotensi terulang di IKN dan sekitarnya.

# RINGKASAN EKSEKUTIF



**O**leh karena itu, diperlukan arah kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Rekomendasi utama meliputi:

- Mengembangkan komplementaritas konsep Tri-Kota atau Panca-Kota dengan pendekatan keterkaitan desa–kota untuk mengakomodasi potensi lokal.
- Memperkuat integrasi *hinterland* melalui pemetaan potensi sumber daya, pengembangan value chain, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Mengadopsi *nature-based solutions* dalam perencanaan kawasan, termasuk pendekatan berbasis DAS, *blue economy*, reforestasi, dan konservasi ekosistem.
- Mendorong skema investasi bertahap yang relevan dengan kebutuhan lokal serta melibatkan pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan.
- Meningkatkan konektivitas transportasi multi-moda untuk menghubungkan kawasan perkotaan dengan *hinterland*, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.

Ringkasnya, keberhasilan IKN sebagai kota berkelanjutan dan pusat pertumbuhan nasional tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik di kawasan inti, tetapi juga oleh kemampuan membangun integrasi yang adil antara kota inti, kota penyangga, dan *hinterland* sebagai mitra strategis.

Keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi yang paling dominan, khususnya pertambangan, perkebunan dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur relatif lemah dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil analisis input-output tahun 2016. Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki ruang yang cukup besar untuk pengembangan keterkaitan antarsektor dan antar daerah, karena masih lemahnya keterkaitan antar sektor tersebut. Hilirisasi berbagai sektor ekstraktif dan agro yang dominan perlu dikuatkan agar nilai tambah komoditas dapat dinikmati setempat dalam bentuk keterkaitan ke depan maupun ke belakang.

Kota-kota kecil seperti Tenggarong dan Penajam dapat diberikan fungsi sebagai pusat pengolahan dan hilirisasi berbagai produk hasil ekstraksi sumberdaya alam tertentu dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang selama ini cenderung dibawa keluar tanpa proses pengolahan setempat. Hasil ekstraksi sumberdaya alam dari Kalimantan Timur cenderung memiliki keterkaitan dan kontribusi yang relatif rendah dalam keterkaitan antarsektor.

# PEMETAAN MASALAH



Policy brief ini mengangkat empat persoalan utama, yaitu:

## 1. IKN MASIH BERGANTUNG PADA SUMBER DAYA TRANSLOCAL

Berbagai macam sumber daya dibutuhkan dalam pembangunan IKN, hingga saat ini belum dalam dipenuhi oleh sumber daya lokal. Hal tersebut memunculkan adanya ketergantungan IKN dengan wilayah lain dalam pemenuhan sumber daya yang digunakan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan IKN. Beberapa sumber daya di antara yakni terkait dengan pasokan pangan, material, hingga tenaga kerja. Pasokan pangan IKN hingga saat ini masih bergantung dari luar wilayah Kalimantan Timur, utamanya dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. Hal tersebut memunculkan adanya risiko ketahanan pangan yang rapuh, termasuk biaya distribusi pangan yang tinggi sehingga memunculkan potensi harga pangan yang mahal di IKN.

Di sisi lain, pada bahan material konstruksi juga masih didatangkan dari Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Kapasitas industri bahan bangunan lokal masih sangat terbatas dan belum siap untuk memenuhi kebutuhan untuk pembangunan IKN. Ketergantungan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengerjaan proyek, tingginya biaya logistik, serta memunculkan ketergantungan jangka panjang pada suplai dari luar daerah.

Sumber daya manusia atau dalam hal ini yakni tenaga kerja juga masih banyak didatangkan dari luar daerah. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM lokal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor strategis, seperti konstruksi, logistik, energi, dan teknologi. Beberapa SDM lokal sebenarnya memiliki ketrampilan untuk bidang tertentu, tetapi standar upah yang ditawarkan dalam pembangunan IKN lebih rendah daripada upah yang berlaku pada masyarakat lokal. Kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang didatangkan dari Jawa dan luar Kalimantan.

Pembangunan infrastruktur IKN hingga saat ini dianggap masih belum mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Target proyeksi populasi IKN yang tinggi masih bersifat spekulatif dan sulit dipenuhi asumsi-asumnya. Jumlah penduduk masa depan sangat bergantung pada investasi yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang dihasilkan, dan kontinuitas kebijakan pemerintah dalam pembangunan IKN.

# PEMETAAN MASALAH



Dalam perspektif teoretik pembangunan kota baru seperti IKN biasanya mengedepankan penyediaan infrastruktur yang lengkap yang kemudian akan diikuti dengan investasi, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan penduduk. Namun dalam pembangunan IKN saat infrastruktur sedang disiapkan dan belum sempurna, pada saat yang sama investasi diharapkan hadir. Selain itu orde dan jenis-jenis pelayanan yang disiapkan untuk IKN adalah orde nasional, namun demikian saat ini jumlah penduduk setempat sebagai pengguna pelayanan orde nasional masih sangat terbatas jumlahnya. Dengan demikian terdapat risiko *mismatch* antara besarnya kapasitas dan tingginya orde infrastruktur yang disiapkan dengan minimnya jumlah penduduk dan permintaan riil yang sebenarnya ada saat ini.

## 2. KETIMPANGAN PERAN KOTA

Konsep pengembangan Ibu Kota Nusantara akan dilakukan dengan kerja sama antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sebagai kota eksisting di Provinsi Kalimantan. Kota Balikpapan akan dikembangkan sebagai 'otot' yang berfungsi sebagai simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur, sedangkan Kota Samarinda sebagai 'jantung' dengan perannya sebagai pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi terbarukan. Ibu Kota Nusantara sendiri akan bertindak sebagai 'syaraf' bagi wilayah pemerintah pusat dan pusat inovasi hijau.

Konsep pengembangan ini memberikan kejelasan fokus pembangunan pada kota-kota besar dengan infrastruktur yang relatif sudah matang. Selain itu, lokasi yang tidak terlalu jauh memungkinkan konsep ini untuk diimplementasikan. Namun, di sisi lain konsep ini juga berpotensi memperkuat dominasi Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sementara pusat-pusat kegiatan di daerah lainnya akan terpinggirkan. Pengembangan keterkaitan antara Ibu Kota Nusantara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda diperlukan suatu hubungan hierarkis dengan kota-kota dan kawasan perkotaan pada orde di bawahnya. Dalam perencanaan tata ruang wilayah, dikenal istilah pusat-pusat kegiatan yang terhubung dari hierarki paling tinggi (pusat) hingga hierarki tingkat lokal. Untuk mengembangkan konsep keterkaitan antarkota, diperlukan keterkaitan desa – kota agar komplementaritas hinterland dengan sumber daya alamnya dapat terintegrasi secara sistemik dengan kota-kota terdekat secara hirarkhis. Peran kota sekunder (*secondary city*) menjadi sangat penting dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan di kota utama dengan sumber daya di *hinterland*. Dalam hal ini, kawasan perkotaan Penajam dan Tenggarong memiliki peran yang besar.

# PEMETAAN MASALAH



## 3. PERBEDAAN KONSEP PENGEMBANGAN ANTAR DAERAH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI

Dalam perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Otorita IKN bersama dengan Kementerian PPN/BAPPENAS, serta Japan International Cooperation Agency (JICA) menyusun suatu konsep bernama Tri-Kota yang diajukan sebagai bentuk integrasi keruangan wilayah antara IKN dengan Samarinda dan Balikpapan sebagai kesatuan ekosistem pertumbuhan ekonomi terpadu. Konsep ini pada dasarnya berangkat dari logika efisiensi dengan pemanfaatan dua kota besar di Kalimantan Timur yang telah memiliki infrastruktur memadai, terkhususnya untuk menunjang kebutuhan logistik, energi, dan perdagangan. Namun, konsep Tri-Kota memiliki keterbatasan dengan fokus perencanaan yang terkonsentrasi pada kawasan perkotaan besar, sehingga berpotensi memperbesar kesenjangan pembangunan wilayah di sekitarnya. Kesenjangan ini terutama akan sangat berdampak terhadap Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi inti IKN hingga unit pemerintahan terkecil (desa dan kelurahan) di sekitarnya yang seharusnya diarahkan menjadi penopang sumber daya berdasarkan potensi yang dimiliki, baik dari bidang pertanian, pariwisata, serta bidang lainnya.

Sebagai respons dari penyusunan konsep Tri-Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajukan konsep lain bernama Panca-Kota; dengan menambahkan Tenggarong (Kutai Kartanegara) dan Penajam Paser Utara ke dalam integrasi wilayah pendukung IKN. Adanya penambahan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, pengintegrasian peran daerah lain yang selama ini berada di pinggir pusat pertumbuhan, serta memperluas cakupan manfaat pembangunan IKN terhadap daerah di sekitarnya.

Adanya perbedaan konsep antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dapat memunculkan permasalahan baru, dengan adanya potensi ketidaksinkronan kebijakan beserta implementasinya dalam skala lokal. Selain itu, sebagaimana pembahasan mengenai permasalahan ketimpangan peran kota, konsep yang terlalu berorientasi ke kota berpotensi mengabaikan daerah penyangga. Sinkronisasi arah pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi daerah eksisting hingga unit pemerintahan terkecil (desa dan kelurahan).

# PEMETAAN MASALAH



## 4. RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH YANG MASIH BERFOKUS PADA SEKTOR EKONOMI

Ibu Kota Nusantara dikembangkan menjadi superhub ekonomi nasional dengan harapan dapat menyeimbangkan disparitas pembangunan antara Indonesia wilayah timur dan barat. Tujuan tersebut ingin dicapai dengan pengembangan konsep Tri – Kota dan kawasan-kawasan industri. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga sedang menginisiasi pengembangan konsep dari Tri – Kota menjadi Panca – Kota yang mengakomodasi lebih banyak kawasan perkotaan. Berdasarkan pada rencana yang sedang disiapkan, orientasi pengembangan masih berfokus pada sektor ekonomi (Musthofa dkk, 2025). Belum ada konsep kebijakan atau rencana yang mengarah pada kerja sama daerah dalam bidang ekologi atau lingkungan.

Berkaca pada kawasan aglomerasi perkotaan Jakarta yang terdiri dari berbagai daerah di sekitarnya. Pengembangan kawasan ini ditetapkan untuk berbagai mempermudah berbagai urusan pembangunan baik perencanaan infrastruktur terpadu, pelayanan transportasi publik dan barang, ekonomi serta pengelolaan lingkungan guna mengatasi tantangan yang komprehensif.

Urbanisasi yang terus terjadi dan permasalahan lingkungan yang belum kunjung terselesaikan di Jakarta tampaknya menjadi permasalahan yang juga berpotensi timbul di wilayah Ibu Kota Nusantara dalam jangka panjang (BRIDA Kalimantan Timur, 2023) dan perlu dimitigasi sedini mungkin.



# REKOMENDASI KEBIJAKAN

## UNTUK PEMERINTAH PUSAT



### Mengembangkan konsep Tri – Kota dengan mengakomodasi potensi-potensi lokal dengan pendekatan keterkaitan desa-kota

1

- Mengakomodasi gagasan pemerintah daerah terkait pengembangan konsep kota yang mempertimbangkan peran daerah-daerah di sekitar wilayah IKN (tidak hanya pada tiga kota terbesar saja), dengan tetap memprioritaskan keberadaan keterkaitan desa-kota.
- Melakukan pemetaan potensi lokal daerah terutama kaitannya dengan penguatan hubungan desa-kota baik di dalam kawasan IKN maupun di daerah sekitarnya.
  - Mengidentifikasi potensi sumber daya alam, tenaga kerja, produk unggulan dan jasa lokal.
  - Menyusun basis data spasial desa-kota sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Mendorong distribusi fungsi ekonomi, sosial, dan budaya lokal supaya pertumbuhan tidak hanya terpusat pada kota-kota inti.
- Mengembangkan mekanisme *value chain* dengan melibatkan aktor lokal di desa dan kota.
- Menyeimbangkan tujuan utama terkait pertumbuhan ekonomi makro dengan kesejahteraan masyarakat lokal.
  - Menyusun strategi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transisi desa-kota.
  - Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui UMKM, pertanian modern, pariwisata berbasis komunitas, dan aktivitas ekonomi lokal lainnya.

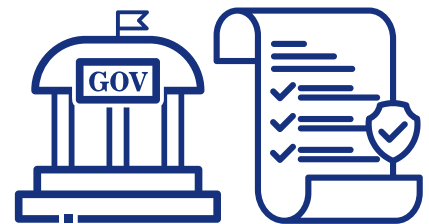
## Menggunakan pendekatan *Nature Based Solution* dalam pengembangan Kawasan IKN dan sekitarnya

2

- > Pembangunan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan mengintegrasikan aspek fisik, non fisik, budaya serta kelembagaan.
- > Melakukan praktik pembangunan berbasis laut melalui pengembangan konsep *blue economy* guna menciptakan manfaat ekonomi.
- > Melakukan reforestasi tidak hanya di wilayah Ibu Kota Nusantara, tetapi juga di daerah sekitarnya serta melakukan konservasi dan restorasi lahan basah dan mangrove
- > Peningkatan pengelolaan dan proteksi terhadap hutan lindung

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

### UNTUK **BADAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (OIKN)**



## Skema Investasi Bertahap dalam Pembangunan IKN

1

- > Menjaga relevansi pembangunan dengan kebutuhan eksisting di lingkungan masyarakat setempat dengan perencanaan dan implementasi pembangunan secara bertahap
- > Melakukan *screening* terhadap program pembangunan yang diajukan, menyesuaikan dengan prioritas daerah dan kondisi setempat
- > Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bertahap terhadap proyek yang sedang dan/atau telah terlaksana
- > Mempertimbangkan keberlanjutan finansial dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam proses *screening* program pembangunan yang diajukan

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

## UNTUK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TIMUR

### Memperdalam konsep Panca – Kota yang mampu mengakomodasi potensi-potensi lokal di kawasan hinterland

1

- Pemerataan peran tiap daerah hingga unit pemerintahan terkecil (desa dan kelurahan) dengan mempertimbangkan peran strategis desa dan kelurahan sebagai penyedia sumber daya, baik untuk kepentingan pangan, tenaga kerja, maupun lahan sebagai penopang dalam keberlanjutan pembangunan
  - Melakukan pemetaan potensi sumber daya alam, komoditas unggulan, dan sektor yang berkembang pada tingkat desa dan kelurahan
  - Penyusunan basis data baik statistik maupun spasial sebagai dasar dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah
  - Penyusunan rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dengan pengoptimalan kontribusi setiap daerah; baik kota, peri-urban, hingga desa menyesuaikan potensi yang dimiliki
- Melibatkan desa dan kelurahan dalam rantai perekonomian dengan pengembangan pariwisata, pertanian pangan lokal, serta industri kreatif berbasis lokal
- Memberikan ruang kepada desa dan kelurahan untuk terlibat dalam tata kelola pemerintahan berbasis kolaboratif, seperti melibatkan perwakilan dari desa dan kelurahan dalam forum diskusi perencanaan pembangunan

### Meningkatkan konektivitas melalui integrasi transportasi multi-moda yang menghubungkan seluruh kawasan perkotaan dengan kawasan hinterland

2

- Membentuk kerangka kerja sama kelembagaan untuk pengelolaan transportasi regional antar kabupaten/kota.
- Melakukan perencanaan jaringan transportasi (*masterplan*) hingga tingkat lokal yang mudah diakses dan mampu menghubungkan antar kawasan perkotaan dengan kawasan hinterland.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

## UNTUK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TIMUR

- Mengidentifikasi titik-titik prioritas keterhubungan antara kawasan perkotaan dan *hinterland*, misal pada jalur desa-kota, pelabuhan sungai, pasar induk, kawasan industri, atau pusat kegiatan lainnya.
- Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang sudah ada agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat lokal dan investor dari luar.
- Mengembangkan sistem transportasi umum yang terintegrasi pada skala kecil-menengah, misal dengan adanya angkutan desa, bus, dan jalur penyebrangan.
- Memastikan pembangunan infrastruktur transportasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan agar tepat sasaran.

# DAFTAR PUSTAKA

---

BRIDA (Badan Riset dan inovasi Daerah) Provinsi Kalimantan Timur (2023). Identifikasi Potensi Lokal Pada Kawasan Peri-Urban Ibu Kota Negara

BRIDA (Badan Riset dan inovasi Daerah) Provinsi Kalimantan Timur (2024). Konsep Buffer Zone (Wilayah Penyangga) Ibu Kota Nusantara

Musthofa, A., Reinhart, H., Rijanta, R., & Saputra, E. (2025 July 4). Sustainable Urban Dreams in an Extractive Landscape: The Development of Nusantara Capital City in East Kalimantan. G(e)overnmentality. Unpacking the Roles of Geological and Geographical Knowledge for Earth Governance. LANDac 2025

Rijanta, R. dkk. (2022). Sustainability Challenges in the Development of Nusantara, The New Capital of Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rijanta, R. dkk. (2023). Rural Urbanization in a Resource Frontier Region: Lessons from Nusantara, the New Capital of Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rijanta, R., Saputra, E., Susanti, A., Kumalawati, R., Budiman, P.W., Musthofa, A., Wati, E.T. (2024). Greening the change: Macro-micro perspectives in sustainability challenges in Indonesian capital relocation. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 19, No. 5, pp. 1785-1793. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190516>

